



KTT DI HONG KONG SOROTI TANTANGAN YANG DIHADAPI BANK SENTRAL

KTT yang diselenggarakan oleh Otoritas Moneter Hong Kong dan Bank for International Settlements diadakan Selasa (28/11) di Hong Kong, dengan diikuti lebih dari 300 peserta termasuk Gubernur Bank Rakyat Tiongkok, Pan Gongsheng. Para pembicara berdiskusi dan berbagi wawasan mereka mengenai isu-isu termasuk tantangan utama yang dihadapi bank sentral dan pembuat kebijakan.

Diplomasi Hati-hati Qatar Hasilkan Jeda Pertempuran di Gaza

Qatar mengambil kebijakan luar negeri yang baik, dan berperan sebagai “Swiss di Timur Tengah”, dengan tetap membuka pintu bagi semua pendatang.

QATAR(IM) -Pengumuman kesepakatan “jeda kemanusiaan” di Jalur Gaza dapat dianggap sebagai kemenangan besar diplomasi negara kecil Qatar.

Negosiasi tentang pembebasan sandera Hamas, yang ditukar dengan tahanan Palestina di Israel, telah berlangsung selama berminggu-minggu. Pada satu titik, pemerintah Israel dilaporkan menolak tawaran serupa dan memilih melancarkan serangan darat ke Gaza.

Namun, tekanan komunitas internasional, terutama dari Amerika Serikat, dan dari keluarga sandera di Israel semakin meningkat, yang menuntut agar pemerintah fokus pada pembebasan sandera.

Mesir, yang menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel tahun 1979 dan berbagi perbatasan dengan Israel dan Gaza, juga membantu dalam negosiasi tersebut. Namun Qatar yang memainkan peran kunci dan memimpin mereka perundingan.

Setelah Qatar mengumumkan terjadinya kesepakatan “jeda pertempuran”, Presiden AS Joe Biden dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memposting pesan di X (sebelumnya Twitter) dan berterima kasih kepada Mesir dan Qatar atas “kemiripan penting” mereka dalam negosiasi.

Sebelumnya, penasihat keamanan nasional Israel Tzachi Hanegbi sudah memuji peran Qatar.

Dia menulis di media sosial bahwa “upaya diplomasi Qatar sangat penting saat ini.”

Namun tidak semua orang begitu senang dengan negara Teluk yang kecil ini. Beberapa komentator mengatakan, para perunding seharusnya berusaha lebih keras untuk menjamin pembebasan lebih banyak sandera. Yang lain berpendapat bahwa karena Qatar telah menjadi rumah bagi para pemimpin politik Hamas sejak tahun 2012, maka Qatar juga harus dipandang terlibat dalam serangan Hamas ke Israel.

Sementara itu, Para ahli sepakat bahwa Qatar mengambil kebijakan luar negeri yang baik, dan berperan sebagai “Swiss di Timur Tengah”, dengan tetap membuka pintu bagi semua pendatang.

“Peran Qatar sangat sensitif, karena emirat ini telah mengandalkan peran perantara selama lebih dari dua dekade,” kata Guido Steinberg, peneliti senior di German Institute for International and Security Affairs SWP di Berlin, kepada DW baru-baru ini.

Di masa lalu, Qatar juga bertindak sebagai penengah antara komunitas internasional dan Taliban di Afghanistan, yang juga memiliki kantor politik di Doha.

Pada saat yang sama, Qatar juga menjadi tuan rumah markas militer AS terbesar di Timur Tengah, yaitu di Pangkalan Udara al-Udeid, yang memainkan peran penting dalam evakuasi dari Afghanistan pada tahun 2021. Hal ini menyebabkan Qatar digambarkan sebagai “sekutu utama non-NATO”.

Qatar sejak dulu telah menjadi penengah antara Israel dan Hamas—misalnya pada Perang Israel-Gaza tahun 2014.

Qatar sempat membekukan hubungan dengan Is-

rael pada tahun 2009, namun diduga mempertahankan hubungan di balik layar.

Pada tahun 1996, ketika negara-negara lain di kawasan itu dengan tegas menentang hubungan apa pun dengan Israel, Qatar mengizinkan Israel untuk membuka misi dagang di Doha.

“Qatar telah lama memiliki hubungan pragmatis yang menggunakan insentif finansial untuk mengelola dan meredakan berbagai ketegangan dan perang antara Israel dan Hamas,” kata Sanam Wakil, direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di lembaga think tank yang berbasis di Inggris, Chatham House.

Vakil melihat Qatar sebagai “perantara alami untuk mengamankan para sandera dan menemukan titik masuk untuk mengurangi ketegangan dan melindungi orang-orang di lapangan ketika masalah kemanusiaan memburuk.”

Baru-baru ini, Qatar menghabiskan sekitar USD30 juta per bulan untuk Gaza. Namun beberapa pengamat berpendapat bahwa uang Qatar telah mensubsidi sayap militer Hamas dan digunakan untuk tujuan jahat.

Menjawab pertanyaan Reuters tentang dana Gaza bulan

lalu, seorang pejabat pemerintah Qatar mengatakan, dana tersebut diperuntukkan bagi keluarga yang membutuhkan dan gaji pegawai negeri, termasuk dokter dan guru di Jalur Gaza.

PBB menyebutkan, 80% penduduk Jalur Gaza bergantung pada bantuan internasional, bahkan sebelum krisis saat ini terjadi.

Uang Qatar sebenarnya masuk melalui Israel, kata seorang pejabat Qatar kepada Reuters. Dana tersebut ditransfer secara elektronik ke Israel, yang kemudian diteruskan ke otoritas Gaza yang dikelola Hamas, dan semua pembayaran “sepenuhnya dikoordinasikan dengan Israel, PBB dan Amerika Serikat,” kata mereka.

“Kesepakatan yang dinegosiasikan Qatar antara Israel dan Hamas menandai pencapaian diplomatik penting pertama sejak dimulainya perang,” kata Hugh Lovatt, peneliti senior di tangki pemikir European Council on Foreign Relations (ECFR).

“Ini adalah kesempatan untuk membuka ruang memajukan gencatan senjata penuh yang diperkirakan akan terjadi pada jalur diplomatik yang lebih luas,” pungkas Lovatt kepada DW. ● tom

Diplomat AS-Korut Berdebat di DK PBB

NEWYORK(IM) -Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB dan Korea Utara (Korut) terlibat perdebatan sengit yang jarang terjadi di Dewan Keamanan (DK) PBB. Perang kata-kata itu terkait peluncuran satelit mata-mata Korut dan alasan meningkatnya ketegangan di kawasan itu.

Setelah hampir enam tahun absen, Korut kembali mengirim utusannya untuk PBB ke pertemuan Dewan Keamanan mengenai program nuklir dan rudal balistiknya pada bulan Juli.

Badan beranggotakan 15 negara tersebut bertemu pada hari Senin mengenai peluncuran satelit mata-mata Korut pada 21 November lalu. Di akhir pertemuan, Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield dan Duta Besar Korut Kim Song menyampaikan pernyataan yang tidak direncanakan. Keduanya terlibat dalam duel hak jawab di meja dewan, masing-masing berpendapat bahwa negara mereka bertindak defensif.

“Salah satu pihak yang berperang, Amerika Serikat, mengancam kita dengan senjata nuklir,” kata Kim kepada DK PBB. “Merupakan hak yang sah bagi DPRK sebagai pihak yang berperang untuk mengembangkan, menguji, memproduksi dan memiliki sistem senjata yang setara dengan yang sudah dimiliki dan, atau sedang dikembangkan oleh Amerika Serikat saat ini,” imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (28/11).

Secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK), Korut telah berada di bawah sanksi PBB karena program rudal balistik dan nuklirnya sejak tahun 2006. Hal ini termasuk larangan pengembangan rudal balistik.

Teknologi tersebut digunakan untuk meluncurkan satelit minggu lalu dan mengikuti pengujian puluhan rudal balistik selama 20 bulan terakhir. AS telah lama memperingatkan bahwa Pyongyang siap melakukan uji coba nuklir ketujuh.

“Kami sangat menolak klaim tidak jujur DPRK bahwa peluncuran rudalnya hanya bersifat defensif, sebagai respons terhadap latihan militer bilateral dan trilateral kami,” kata Thomas-Greenfield, seraya menambahkan bahwa latihan AS bersifat rutin, defensif, dan diumumkan sebelumnya.

Pembicaraan denuklirisasi antara Korut, Korea Selatan (Korsel), Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang terhenti pada tahun 2009. Pembicaraan antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan pemimpin AS saat itu,

Presiden Donald Trump, pada tahun 2018 dan 2019 juga gagal. Kim mengatakan bahwa sampai ancaman militer yang terus-menerus dihilangkan, Korut akan terus memperkuat kemampuannya. Thomas-Greenfield mengatakan tindakan Korut didasarkan pada paranoia terhadap kemungkinan serangan AS. “Jika ada yang ingin diberikan AS kepada DPRK, itu adalah bantuan kemanusiaan untuk rakyat Anda dan bukan senjata untuk menghancurkan rakyat Anda,” kata Thomas-Greenfield.

Selama beberapa tahun terakhir Dewan Keamanan PBB terpecah belah mengenai cara menanganai Pyongyang, Rusia dan Tiongkok, yang mempunyai hak veto bersama dengan AS, Inggris dan Perancis, mengatakan bahwa sanksi yang lebih besar tidak akan membantu dan mereka ingin tindakan seperti itu dilonggarkan. ● ans

Finlandia Tutup Perbatasan dengan Rusia untuk Cegah Para Pencari Suaka

HELSINKI(IM) -Otoritas Finlandia akan menutup seluruh perbatasannya dengan Rusia bagi para pelancong selama dua pekan ke depan. Langkah ini dimaksudkan untuk menghentikan meludaknya para pencari suaka yang masuk ke negara Nordik tersebut, yang menurut Finlandia dan sekutu-sekutunya, diatur oleh Rusia.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (29/11), otoritas Finlandia pekan lalu menutup semua pos perbatasannya, kecuali satu pos, bagi para pelancong dari Rusia, dan hanya membuka pos penyeberangan paling utara yang terletak di Arktik. Namun kini pos tersebut juga akan ditutup oleh Finlandia.

Sekitar 900 pencari suaka dari negara-negara seperti Kenya, Maroko, Pakistan, Somalia, Suriah dan Yaman memasuki wilayah Finlandia dari Rusia pada November ini. Menurut Penjaga Perbatasan

Finlandia, angka itu tercatat meningkat dibandingkan data sebelumnya.

Keputusan untuk menutup delapan perlintasan perbatasan itu, menurut Penjaga Perbatasan Finlandia, berarti hanya keretakan kargo yang dapat melintas antara kedua negara. Helsinki menuduh Moskwa mengirim warganya ke perbatasan sebagai pembalasan atas keputusan meningkatkan kerja sama dengan Amerika Serikat (AS). Tuduhan itu telah dibantah oleh Kremlin.

Finlandia membuat marah Rusia pada awal tahun ini ketika negara itu bergabung dengan aliansi NATO, yang mengakhiri sikap non-blok militer Helsinki selama bertahun-tahun, akibat invasi Moskwa di Ukraina.

“Ini merupakan operasi pengaruh oleh Rusia dan kami tidak akan menerimanya,” tegas Perdana Menteri (PM) Petteri Orpo

dalam konferensi pers.

Pada Senin (27/11) waktu setempat, Orpo menyebut negaranya memiliki informasi intelijen soal otoritas Rusia membantu para pencari suaka dan meskipun perbatasan Finlandia ditutup, masih ada lebih banyak orang yang bergerak menuju Finlandia dari Rusia.

Pekan ini, tepatnya pada Senin (27/11) waktu setempat, tercatat hanya ada tiga pencari suaka yang tiba di Finlandia melalui stasiun perencikan Raja-Joosseppi, pos perbatasan terakhir yang masih dibuka, dan pada Selasa (28/11) waktu setempat, sama sekali tidak ada pendatang yang masuk ke negara tersebut.

Stasiun-stasiun perbatasan, sebut pemerintah Finlandia, akan tetap dibuka pada Rabu (29/11) waktu setempat sebelum ditutup sepenuhnya pada 13 Desember mendatang. ● tom



KETERAMPILAN MENGANYAM BAMBU DI GUANGXI

Seorang siswa mempraktikkan keterampilan menganyam bambu di sekolah dasar Nandu di Kota Cenxi, Daerah Otonomi Guangxi Zhuang, Tiongkok, Selasa (28/11). Sebagai warisan budaya takbenda lokal, keterampilan menganyam bambu diperkenalkan di sekolah dasar Nandu dalam beberapa tahun terakhir, yang mana memperkaya kegiatan ekstrakurikuler siswa.

Presiden Peru Disalahkan Atas Kematian Pengunjuk Rasa saat Protes Anti Pemerintah

PERU(IM) -Jaksa penuntut utama Perumenyalahkan Presiden Dina Boluarte, atas kematian sejumlah demonstran selama protes anti-pemerintah. Setelah penyelidikan selama 11 bulan, Jaksa Agung Patricia Benavides mengajukan pengaduan konstitusional terhadap Presiden pada Selasa (28/11).

Boluarte menggambarkannya sebagai “manuver politik yang tercela”. Presiden menuduh Benavides menggunakan pengaduan tersebut sebagai pengalih perhatian dari masalah hukumnya sendiri.

Jaksa Agung mengajukan pengaduan terhadap presiden hanya beberapa jam setelah dia sendiri dituduh memimpin jaringan korupsi, yang diduga membatalkan penyelidikan terhadap anggota parlemen dengan imbalan mereka menunjuk sekutu Benavides untuk menduduki jabatan penting di peradilan.

Benavides membantah melakukan kesalahan apa pun, memecat jaksa yang melontarkan tuduhan terhadap timnya, dan sejauh ini menolak seruan pengunduran dirinya.

Perselisihan antara Presiden Boluarte dan Jaksa Agung Benavides merupakan perkembangan terbaru dalam kesengsaraan politik Peru yang dimulai dengan tergulingnya Presiden Pedro Castillo pada Desember tahun lalu.

Castillo dicopot dari jabatannya oleh anggota parlemen setelah ia mencoba membubarkan Kongres dalam upaya untuk mencegah sidang pemakzulan. Dina Boluarte, yang pernah menjadi wakil presiden Castillo, memihak Kongres dan dilantik sebagai presiden baru untuk menjalani sisa masa jabatan Castillo. Namun para pendukung Castillo turun ke jalan untuk menuntut pengunduran dirinya dan pergolakan selama berminggu-minggu pun terjadi di mana para demonstran memblokir jalan raya utama dan menduduki bandara.

Pemerintahan Boluarte mengerahkan pasukan keamanan untuk memulihkan ketertiban dan mencegah blokade, yang telah menyebabkan ribuan wisatawan terdampar, melumpuhkan perdagangan dan menyebabkan kekurangan makanan dan bahan bakar di beberapa daerah.

Menurut Kantor Ombudsman Peru, setidaknya 49 pengunjuk rasa dan orang yang berada di sekitar tewas sejak Desember 2022 hingga Februari 2023 dalam bentrokan dengan pasukan keamanan.

Banyak dari jenazah tersebut mengalami luka tembak, yang menurut kelompok hak asasi manusia disebabkan oleh senjata yang ditembakkan oleh pasukan keamanan.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada bulan Mei, Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika (IACHR) menyimpulkan bahwa penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, tidak pandang bulu, dan mematikan merupakan elemen utama dalam respons negara terhadap protes tersebut.

Jaksa Agung Patricia Benavides meluncurkan penyelidikan atas kematian para pengunjuk rasa pada awal Januari lalu. Namun pengaduan yang dia ajukan pada Senin (27/11) adalah tuduhan pertama yang diajukan terhadap pemerintah atas bentrokan tersebut.

Benavides mengatakan dalam pidatonya di TV pada Senin (27/11) bahwa dia telah mengajukan “pengaduan konstitusional” terhadap Presiden Boluarte, dan Perdana Menteri (PM), Luis Alberto Otárola, dengan menuduh mereka melakukan pembunuhan.

Namun, tuduhan pembunuhan tersebut seperti tidak akan mengarah pada persidangan pidana dalam waktu dekat. Berdasarkan konstitusi Peru, presiden dan anggota parlemen tidak dapat diadili saat mereka masih menjabat atas dugaan kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari peran mereka.

Jaksa Agung malah dapat mengajukan pengaduan konstitusional yang harus ditinjau oleh komite kongres agar dapat dilanjutkan. Sekalipun pengaduan tersebut disetujui oleh mayoritas anggota Kongres, persidangan hanya akan dilanjutkan setelah Presiden Boluarte dan PM Otárola meringgalkan jabatannya.

Seperti diketahui, masa jabatan Boluarte akan berakhir pada Juli 2026, namun mengingat sejarah kerusuhan, pemakzulan, dan pengunduran diri yang terjadi di Peru baru-baru ini, tetap menjabat sampai saat itu akan menjadi sebuah tantangan. Tidak ada presiden Peru yang menjabat lima tahun penuh sejak Ollanta Humala menyelesaikan masa jabatannya pada 2016. ● ans

Barak Militer dan Penjara Sierra Leone Diserang, 20 Tewas dan 2 Ribu Tahanan Kabur

FREETOWN(IM) -

Dua puluh orang tewas dan hampir 2.000 narapidana melarikan diri dalam sebuah serangan di barak militer, penjara dan lokasi lain di Sierra Leone, kata para pejabat, Selasa (28/11).

Negara Afrika Barat itu dilanda kepanikan pada Senin, (27/11) dini hari ketika para penyerang melepaskan tembakan ke seluruh ibu kota Freetown. Pemerintah menyalahkan “tentara pemberontak” yang dikatakan telah berhasil dipukul mundur.

Presiden Julius Maada Bio mengatakan dalam pidatonya pada Minggu bahwa sebagian besar pemimpin serangan telah ditangkap dan upaya untuk menangkap orang lain sedang dilakukan. Investigasi telah diluncurkan, katanya.

Juru Bicara Angkatan Darat Kolonel Issa Bangura mengatakan kepada Reuters bahwa 20 orang yang tewas termasuk 13 tentara, tiga penyerang, seorang petugas polisi, seorang warga sipil dan seseorang yang bekerja di bagian keamanan swasta. Delapan orang terluka dan tiga ditangkap, katanya.

Sekira 1.890 narapidana melarikan diri dari penjara pusat Jalan Pademba setelah para penyerang menerobos masuk, menurut laporan situasi yang dibagikan petugas penjara kepada Reuters pada Senin. Sejahter ini, 23 orang telah kembali, katanya sebagaimana dilansir Reuters.

Juru Bicara Angkatan Darat Kolonel Issa Bangura mengatakan kepada Reuters bahwa 20 orang yang tewas termasuk 13 tentara, tiga penyerang, seorang petugas polisi, seorang warga sipil dan seseorang yang bekerja di bagian keamanan swasta. Delapan orang terluka dan tiga ditangkap, katanya.

Sekira 1.890 narapidana melarikan diri dari penjara pusat Jalan Pademba setelah para penyerang menerobos masuk, menurut laporan situasi yang dibagikan petugas penjara kepada Reuters pada Senin. Sejahter ini, 23 orang telah kembali, katanya

sebagaimana dilansir Reuters. Dalam penyerang selama dua jam, para penyerang mendobrak gerbang utama dengan sebuah kendaraan setelah tembakan dan peluncur roket gagal menembus pertahanan penjara, kata Kolonel Shek Sulaiman Massaquoi, pejabat direktur jenderal Layanan Pemasarakatan Sierra Leone.

Di dalam penjara pada Senin, seorang reporter Reuters melihat pintu sel dibongkar atau dihilangkan seluruhnya, dan tumpukan sampah dari pembersihan yang sedang berlangsung.

Polisi mendesak para narapidana untuk kembali ke penjara dalam sebuah pernyataan pada Senin, dan menawarkan penghargaan kepada publik atas rincian keberadaan para tahanan yang melarikan diri atau para penyerang.

Kehidupan kembali ke Freetown pada Senin sore ketika toko-toko dan bisnis dibuka setelah pemerintah mengurangi jam malam sepanjang hari menjadi jam malam yang berlaku mulai pukul 21.00-06.00 GMT.

Untuk menunjukkan kembalinya keadaan normal, akun media sosial Bio X pada Senin membagikan foto presiden di belakang mejanya di kantornya dan mengatakan bahwa dia sedang bekerja.

“Tugas yang ada di hadapan kita terlalu besar dan mendesak untuk digagalkan oleh mereka yang berusaha merusak perdamaian dan keamanan yang kita nikmati sebagai sebuah negara,” katanya dalam postingan tersebut.

Sierra Leone, yang masih dalam masa pemulihan dari perang saudara pada tahun 1991-2002 yang menewaskan lebih dari 50.000 orang, berada dalam ketegangan sejak Bio terpilih kembali pada Juni, sebuah hasil yang ditolak oleh kandidat oposisi utama dan dipertanyakan oleh mitra internasional termasuk Amerika, Amerika dan Uni Eropa.

Pada Agustus 2022, setidaknya 21 warga sipil dan enam petugas polisi tewas dalam protes anti-pemerintah. ● gul